

PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL PERKAPITA TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR (M1) DI INDONESIA

Oleh:
Eka Syafitri
H. M. Basir Kimin
Hj. Enny Muhaini Hanafiah

ABSTRACT

Economic growth in a country is reflected from national income. Income of the society is reflected from the national income of capita and can influence the money supply which if income increase will influence the society to consume, it is reflected from the purchasing power. The money supply in this case include the currency and Demand Deposit (DD) or M1. Income and money supply have close relation about 67,7%, it reflects from correlation or is 0,677. Determinant coefficient (r^2) is 45,9%, it means that 45,9% change of money supply causes by income and the rest about 54,1% influenced by the other variables. Therefore the increasing of money supply in Indonesia (1990-2001) it caused by income and by the economic factors but also caused by non-economic factors. The suggestion is BI have to control the economic activity by using the instrument of their policy and it will increase the income of society.

Keyword: Income of Capita, Money Supply

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan negaranya dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, keberhasilan tersebut dapat diukur melalui suatu besaran yang dikenal dengan pendapatan nasional. Walaupun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu bangsa, namun hal tersebut cukup representatif dan sangat lazim digunakan.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada proporsi jumlah uang beredar yang dalam hal ini menggunakan M1. Proporsi uang kartal dan uang giral

yang merupakan komponen M1 dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Indikator pertumbuhan ekonomi selain dapat dilihat dari laju pertumbuhan jumlah uang beredar dapat pula dilihat dari tingkat pendapatan nasional khususnya pendapatan nasional perkapita yang telah mewakili pendapatan dari tiap penduduk. Pendapatan nasional pula akhirnya akan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya pendapatan yang diterima masyarakat akan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi barang ataupun keperluan yang lain sehingga jumlah uang beredar bertambah. Pertambahan konsumsi tersebut sebagai akibat bertambahnya saldo riel masyarakat. Dalam hal ini variabel saldo riel masyarakat dan konsumsi hanyalah variabel antara yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jumlah uang beredar. Variabel tersebut dianggap sebagai ceteris paribus.

Bila dilihat secara keseluruhan hubungan kedua indikator tersebut memiliki hubungan yang positif dimana jumlah uang beredar dari tahun 1990 sampai tahun 1997 selalu mengalami peningkatan. Sama halnya dengan pendapatan nasional perkapita. Namun pada tahun 1998, pendapatan nasional perkapita turun menjadi 1.632.512,9 rupiah dari 1.851.611,6 rupiah. Penurunan ini terjadi dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sehingga menyebabkan melemahnya peredaran uang dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan. Disamping itu kebutuhan rupiah yang lebih besar untuk melakukan transaksi sebagai akibat tingginya kenaikan tingkat harga, mendorong masyarakat untuk memilih alat pembayaran yang lebih likuid. Perkembangan ini menyebabkan permintaan akan uang dalam arti sempit meningkat, yaitu dari 22,24 persen menjadi 29,17 persen. Komponen M1 yang meningkat tajam tersebut adalah uang kartal. Hal ini menyebabkan rasio uang kartal terhadap M1 meningkat. Peningkatan permintaan uang kartal terjadi setelah dilakukannya pencabutan izin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997.

Dari kondisi di atas diketahui dari tahun 1990 sampai 1997 kenaikan pendapatan nasional perkapita menyebabkan kenaikan jumlah uang beredar melalui meningkatnya permintaan uang. Jadi hubungan pendapatan disini dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Untuk itulah maka dalam penulisan ini akan membahas mengenai "*Pengaruh Pendapatan Nasional Perkapita Terhadap Jumlah Uang Beredar (M1) Di Indonesia*".

TINJAUAN PUSTAKA

Uang yang mula-mula diperkenalkan adalah uang kertas yang mana pada mulanya uang kertas tersebut dipergunakan untuk menggantikan sejumlah emas yang dimiliki seseorang yang disimpan dalam bank. Sesuai dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama sekali dalam perkembangan perdagangan masyarakat, uang kertas dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar dimana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan resiko tertinggal dan keadaan yang tidak praktis. Timbullah kemudian gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan dari perbankan yaitu untuk menggunakan uang giral (giro, rekening

koran ataupun cek) dalam menyelesaikan transaksi-transaksi perdagangan. Hal ini dilakukan oleh karena dengan cek tersebut sejumlah uang yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi dapat dengan mudah dituliskan dan diberikan kepada orang yang berkepentingan dan untuk menukarkan sejumlah yang tertera dalam cek tersebut yang bersangkutan dapat menukarkannya dengan uang kartal di bank.

Penggunaan uang giral dan semakin berkembangnya penggunaan cek dan giro bilyet dalam kegiatan perekonomian masyarakat tergantung dari kemajuan cara berpikir masyarakat dan kemajuan suatu negara. Artinya bila kemajuan perekonomian telah cukup baik maka kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan akan semakin besar dan mereka semakin banyak memerlukan uang giral.

Uang giral yang dimaksud adalah *Demand Deposit Money* yaitu uang yang berada pada bank yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh si pemegangnya. Selain itu dari penggunaan cek dalam uang giral juga digunakan giro bilyet yaitu suatu perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang kepada rekening orang yang ditunjuk oleh nasabah. Sedangkan uang dalam arti sempit (*Near Money*) atau deposito berjangka (*Time Deposit Money*) adalah sesuatu yang dalam jangka waktu dekat akan menjadi uang. Umumnya terdiri dari deposito berjangka dan obligasi pemerintah yang hampir jatuh tempo.

Dalam perhitungan jumlah peredaran uang terdapat kecenderungan untuk memasukkan *Near Money* dalam perhitungan uang yang beredar. Akan tetapi berdasarkan perhitungan standar moneter dan kepentingan moneter yang realistis maka pendapat itu ditentang oleh para ahli ekonomi yang umumnya menggunakan uang kartal dan uang giral sebagai jumlah uang yang beredar.

Pada umumnya uang yang digunakan oleh masyarakat dalam bentuk permintaan uang yang terdiri dari uang kartal dan uang giral (M1). Berdasarkan tingkat likuiditasnya, uang didefinisikan sebagai berikut :

1. Pengertian yang paling sempit:

Uang adalah uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat atau sama dengan uang tunai (*currency*) disebut juga sebagai uang kartal.

2. Pengertian dalam arti sempit (*Narrow Money*) disebut M1 :

Uang adalah uang beredar yaitu uang kartal dan uang giral atau *Currency* ditambah *Demand Deposit*.

$$M1 = C + DD$$

C = *Currency* (uang kartal)

DD = *Demand Deposit* (uang giral)

Uang giral adalah saldo rekening koran/giro milik masyarakat yang ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar/berbelanja. Selain komponen M1 di atas di beberapa negara memasukkan *traveller's check*, kartu kredit (*credit cards*) sebagai komponen M1 (DR. Winardi, 1985; 45).

Uang dalam rekening koran dianggap sebagai uang dikarenakan sebuah "*demand deposit*" (DD) merupakan suatu janji bank untuk segera membayar sejumlah uang yang dispesifikasi oleh seorang langganan (klien) bank yang memiliki uang dalam

rekening koran tersebut. Jadi, sebuah DD kadang dinamakan check book money, karena ia memungkinkan dibayarkannya transaksi-transaksi dengan alat cek.

3. Pengertian dalam arti luas (Broad Money) disebut M2 :

$$M2 = M1 + TD + SD$$

TD = Time Deposit

SD = Saving Deposit

Time Deposit dan Saving Deposit ini berada pada bank-bank dalam bentuk rupiah, tidak termasuk mata uang asing.

4. Pengertian lebih luas lagi :

$$M3 = M1 + Quasy Money$$

Quasy Money mencakup semua TD dan SD, besar kecil, dalam bentuk rupiah dan mata uang asing milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

5. Pengertian yang paling luas :

Yang disebut likuiditas total atau total liquidity (L) mencakup semua alat-alat likuid yang ada di masyarakat, yaitu M3 ditambah seluruh obligasi pemerintah dan swasta, jangka pendek, wesel perusahaan, cek mundur, aksep bank, deposito di luar negeri, dan lain-lain.

Di negara yang menganut sistem devisa bebas seperti Indonesia dimana setiap orang boleh memiliki dan memperjualbelikan devisa secara bebas maka perbedaan antara M2 dan M3 menjadi kabur, oleh karena itulah di Indonesia hanya dikenal dua pengertian uang berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu M1 dan M2.

M1 terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (DD). Sedangkan M2 yang sering disebut juga likuiditas perekonomian terdiri dari M1 ditambah uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka (TD), tabungan (SD) dan rekening (tabungan) valuta asing milik swasta domestik. Jadi likuiditas perekonomian (M2) di Indonesia terdiri dari : Uang kartal + Uang Giral + Uang Kuasi.

Teori Kuantitas Uang Klasik (Cambridge Equation of Exchange)

Merupakan bentuk lain dari teori kuantitas daripada uang yang dikemukakan oleh Marshall, Pigou, Robertson dan Keynes. Cambridge Equation mengenal dua versi, yaitu :

a. Cash Balance Equation \rightarrow $M = k.PT$
(D.H Robertson)

b. Income Version \rightarrow $M = k.PT = k.Y$
(Marshall)

Dimana : M = Jumlah uang beredar (M1)
V = Cepatnya peredaran uang
P = Jumlah barang
T = Volume barang

1. Cash Balance Equation

$$M = k \cdot PT$$

$$k = 1/V$$

Jika V menunjukkan beberapa kali tiap-tiap rupiah berpindah tangan dari yang satu ke yang lainnya dalam suatu jangka waktu tertentu, maka k menunjukkan berapa lama rata-rata tiap rupiah mengaso di dalam kas selama suatu jangka waktu tertentu, jadi $k = 1/v$, maka secara ilmu hitung rumus $MV = PT$ sama dengan rumus $M = k \cdot PT$.

2. Income Version (Teori Kuantitas Marshall)

$$M = k Y$$

Dimana: M = Jumlah Uang Beredar; k = bagian dari pendapatan nasional yang ingin dipegang dalam bentuk uang; dan Y = Pendapatan nasional

Kalau teori kuantitas yang lain lebih menitikberatkan pada hubungan antara uang dan harga, maka rumus Marshall merupakan hubungan antara *jumlah uang beredar dengan pendapatan nasional*.

Teori Marshall ini merupakan dasar dari "demand for Money". Selanjutnya pandangan dari Marshall (kY) inilah, benih "Liquidity Preference Theory" dari Keynes.

Kesimpulan dari Teori Kuantitas secara umum adalah :

1. Adanya tambahan JUB akan dibelanjakan semua tanpa dipikirkan kemungkinannya untuk ditabung.
2. Velocity of money (V) dan volume transaksi (T) dianggap tetap dan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor nonmoneter (faktor kelembagaan).
3. Tambahan JUB tidak akan mempengaruhi sektor riil (*classical di chotomy*).
4. Tingkat harga umum akan selalu berubah mengikuti JUB.

Quantity Theory (Keynesian)

Keynesian menganggap bahwa jumlah uang beredar sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Dengan kata lain jumlah uang bukan merupakan faktor eksogen. Guna melihat pengaruh kegiatan ekonomi terhadap jumlah uang digunakan rumusan jumlah uang (angka pelipat uang), sebagai berikut (Nopirin :2000: 94):

$$\Delta M = \frac{1 + k}{r(1 + t + g) k}$$

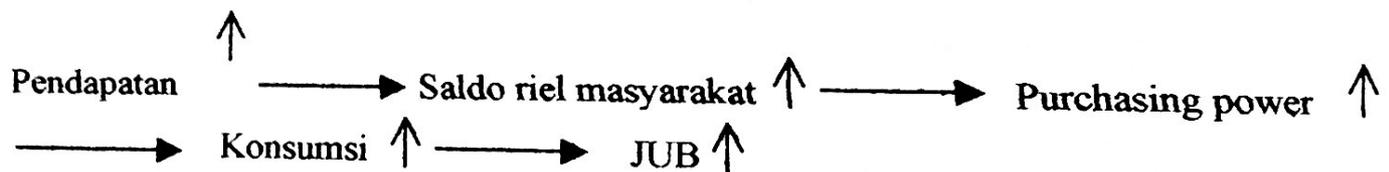
- Dimana : ΔM = tambahan jumlah uang beredar
 ΔMB = tambahan uang inti (*monetary base*)
 k = proporsi uang kertas terhadap giro
 t = proporsi deposito berjangka terhadap giro
 g = proporsi deposito pemerintah terhadap giro

Keynesian berpendapat bahwa besarnya angka pelipat uang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Misalnya, karena sesuatu sebab permintaan total naik, sehingga output, employment serta pendapatan naik. Kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan akan uang. Akibatnya, tingkat bunga akan terdorong naik. Salah satu faktor yang mempengaruhi angka pelipat uang adalah t . Apabila tingkat bunga makin tinggi, maka masyarakat cenderung menyukai deposito berjangka daripada giro, sehingga nilai t cenderung makin besar. Perubahan t akan mempengaruhi jumlah uang beredar.

Dalam hubungan dengan pendapatan, dimana pendapatan dapat mempengaruhi jumlah uang beredar terjadi melalui ; adanya kenaikan pendapatan akan meningkatkan saldo riel masyarakat sehingga menambah daya beli masyarakat (*purchasing power*) dan mengakibatkan bertambahnya konsumsi masyarakat dan akan meningkatkan jumlah uang beredar.

Dapat di lihat dari skema di bawah ini :

Gambar 1. Bentuk Skematis Aliran Pendapatan Terhadap JUB



Selain itu J.M Keynes mengatakan hubungan antara jumlah uang dengan pendapatan yaitu dengan adanya pertambahan uang belum tentu pendapatan ikut bertambah atau tidak, karena ini tergantung pada liquidity dari masyarakat (*the behaviour of the community*), yang semuanya itu dapat menentukan arah gerakan dari uang. Atau dengan kata lain pendapatan merupakan faktor yang menentukan besarnya uang aktif (*active money*) yaitu M_1 sedangkan *idle money* (M_2) tidak ditentukan oleh pendapatan (Indra Darmawan; 1992: 78).

METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan nasional perkapita terhadap jumlah uang beredar (M_1).

Penelitian ini dilakukan terhadap pendapatan nasional perkapita dan jumlah uang beredar khususnya M_1 yang bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan nasional perkapita terhadap jumlah uang beredar (M_1).

Dalam penulisan ini, data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan Biro Pusat Statistik (BPS). Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur untuk memperoleh teori dan konsep serta mempelajari makalah atau laporan yang terkait dan juga hasil-hasil penelitian terdahulu.

Dalam penulisan ini, data yang digunakan yaitu dengan melakukan studi pustaka yang mempelajari buku-buku dan literatur untuk memperoleh teori atau konsep, mempelajari makalah atau laporan yang terkait dan juga hasil-hasil penelitian terdahulu.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian adalah analisis kualitatif deskriptif dan analisis secara statistik (inferensial). Metode yang digunakan ini akan menyajikan rangkuman data atau nilai-nilai yang dihitung berdasarkan data yang telah tersedia atau data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis keadaan atau kondisi sampel berdasarkan permasalahan yang sedang dibahas berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penulisan ini.

Sedangkan teknik analisis deskriptif kuantitatif, dimana terdapat variabel pendapatan nasional perkapita yang berpengaruh terhadap variabel jumlah uang beredar. Dimana metode inferensial (statistik) dalam penulisan ini menggunakan model regresi sederhana antara variabel independen dan variabel dependen.

Secara umum hubungan antara variabel-variabel tersebut dituliskan dalam persamaan (J. Supranto; 1984; 3):

$$Y = A + BX + e_i$$

- Dimana : Y = Jumlah uang beredar (M_1)
A = nilai konstanta
B = koefisien pendapatan nasional perkapita terhadap jumlah uang beredar.
X = tingkat pendapatan
 e_i = gangguan, merupakan kekuatan yang mempengaruhi variabel dependen (jumlah uang beredar) namun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Untuk pengujian hipotesis regresi dilakukan T test dengan langkah pengujian :

$H_0 : \beta_1 = 0$ variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependent.

$H_a : \beta_0 = 0$ variabel independent mempengaruhi variabel dependent.

Uji T ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independent secara individu terhadap variabel dependent, dengan menganggap variabel lainnya konstan. Bila nilai t hitung lebih besar dari t tabel pada tingkat kepercayaan tertentu, maka hipotesis nol ditolak dan ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependent.

Untuk pengujian keeratan antar variabel digunakan koefisien determinasi (R^2) dan koefisien korelasi (r).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Nasional Perkapita terhadap Jumlah Uang Beredar (M1) di Indonesia

Untuk membuktikan pengaruh pendapatan dan jumlah uang beredar yang dalam hal ini M1, maka diadakan suatu penelitian yang dalam arti apakah naik turunnya pendapatan memiliki pengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai pengaruh antara kedua variabel tersebut baik secara kualitatif dan secara analisis inferensial (statistik) dengan menggunakan metode regresi linear sederhana.

Analisis Kualitatif Pengaruh Pendapatan Nasional Perkapita Terhadap Jumlah Uang Beredar (M1) Di Indonesia Periode Tahun 1990 – 2001

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengaruh pendapatan terhadap jumlah uang beredar khususnya M1 di Indonesia secara kualitatif dengan menggunakan data dari tahun 1990 sampai tahun 2001.

Uang merupakan suatu alat yang penting dalam suatu perekonomian. Dimana bila terjadi kelebihan uang dalam perekonomian dapat menyebabkan inflasi. Dan bila kekurangan uang, perekonomian akan menjadi lesu atau terjadi deflasi. Sesuai dengan fungsinya, uang memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan adanya uang akan dapat memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa, terutama pada sektor perdagangan. Namun, dalam perkembangannya, uang yang beredar harus dilakukan pengawasan terhadap peredarannya. Karena dengan kenaikan jumlah uang beredar yang jauh melebihi pertumbuhan permintaan akan uang akan menyebabkan inflasi, yang pada akhirnya akan menurunkan kegiatan usaha serta merosotnya tingkat pendapatan masyarakat.

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Nasional Perkapita dan Jumlah Uang Beredar (M1) di Indonesia.

Tahun	M1 (Milyar)	Pendapatan Nasional Perkapita (atas dasar harga konstan)
1990	23.819	545.108,0
1991	26.341	576.150,0
1992	28.779	600.168,6
1993	36.805	623.440,6
1994	45.374	1.577.743,2
1995	52.677	1.674.867,7
1996	64.089	1.819.811,4
1997	78.343	1.851.611,6
1998	101.197	1.632.512,9
1999	124.633	1.637.116,0
2000	162.186	1.769.959,6
2001	177.131	1.744.178,3

Sumber : Data diolah

Salah satu sasaran kebijaksanaan moneter adalah untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian, agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Melalui pengendalian jumlah uang beredar diharapkan dapat dicapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan terjadinya inflasi akibat bertambahnya jumlah uang beredar yang mendorong permintaan akan barang-barang (*demand pull inflation*).

Berdasarkan tabel diatas, pada periode tahun 1990 sampai tahun 2001, pendapatan nasional perkapita selalu memberikan pengaruh dengan peningkatan jumlah uang beredar (M1) di Indonesia dengan jumlah yang cenderung meningkat, walaupun pengaruh tersebut tidak selalu sebanding atau searah untuk setiap tahunnya.

Pengaruh pendapatan nasional yang cukup nyata terjadi pada tahun 1990-1991 dimana pada periode tersebut hubungan antara kedua variabel tersebut selalu searah. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1991 hingga tahun 1996.

Sedangkan hubungan yang tidak searah antara pendapatan dan jumlah uang beredar di Indonesia terjadi pada tahun 1997 - 1998 dan tahun 2000 - 2001. Dimana pada tahun tersebut M1 selalu mengalami peningkatan sedangkan pendapatan nasional mengalami penurunan setiap tahunnya. Hubungan yang tidak searah atau sebanding tersebut disebabkan karena pada tahun 1997 - 1998 terjadi krisis ekonomi dalam negeri sebagai dampak krisis ekonomi dari dunia internasional sehingga mengakibatkan perekonomian kacau balau.

Krisis ekonomi dalam negeri ini sebagai dampak dari krisis nilai tukar rupiah yang terjadi di pertengahan tahun 1997 dimana penyebarannya sangat cepat mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang cukup besar. Krisis tersebut berkembang semakin parah karena terdapatnya berbagai kelemahan mendasar di dalam perekonomian nasional.. Bersamaan dengan itu, pengelolaan perekonomian dan sektor usaha yang kurang efisien dan sistem perbankan yang kurang baik menyebabkan gejolak nilai tukar rupiah berubah menjadi krisis utang swasta dan krisis perbankan.

Kelemahan fundamental mikroekonomi juga tercermin pada kerapuhan yang terdapat di dalam sektor keuangan, khususnya perbankan. Sebagian dari kerapuhan tersebut terkait dengan kondisi makroekonomi yang kurang stabil terutama gejolak nilai tukar dan tingginya suku bunga. Ketidakstabilan makroekonomi dan respon kebijaksanaan yang diambil pemerintah menyebabkan bank sulit melakukan penilaian yang akurat mengenai resiko kredit dan resiko pasar. Sebagian besar lainnya dengan kondisi perbankan nasional yang memiliki berbagai kelemahan.

Selain itu juga, pada periode yang sama karena reformasi di tahun 1997 - 1998 sebagai akibatnya terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah kepada bank. Hal ini terlihat dengan perilaku masyarakat yang melakukan penarikan simpanan mereka. Selain itu juga masyarakat lebih banyak membeli dolar dan memindahkan tabungan mereka kepada bank yang dianggap likuid.

Dikarenakan hal tersebut, mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional perkapita yang cukup drastis yang terlihat dari data, yaitu dari 1.851.611,6 rupiah menjadi 1.632.512,9 rupiah. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 219.098,7 rupiah. Sedangkan M1

tetap mengalami peningkatan. Pada periode ini diketahui bahwa hal tersebut tidak searah yang mana hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2000 - 2001. Dimana pendapatan nasional perkapita menurun sebesar 25.781,3 rupiah sedangkan MI tetap meningkat sebesar 14.945 rupiah. Hal ini terjadi dikarenakan inflasi yang meningkat cukup tinggi karena adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga barang dan jasa seperti BBM, gas, rokok dan air minum. Dan pertumbuhan ekonomi disini mengalami sedikit perlambatan baik dari migas maupun non-migas dan juga terjadi karena adanya kelesuan aktivitas ekonomi di berbagai sektor seperti sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan maupun bangunan agak lebih melambat dibandingkan aktivitas di tahun 2000.

Selain itu juga kondisi keamanan yang kurang kondusif dengan adanya demonstrasi pergantian pemerintah Gus Dur ke Megawati. Dan dari sudut dunia investasi terjadi kasus perselisihan buruh. Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional dikarenakan terganggunya stabilitas perekonomian sehingga menurunkan pendapatan nasional perkapita masyarakat di Indonesia.

Dari kejadian-kejadian yang dijelaskan di atas diketahui bahwa hubungan yang tidak selalu searah atau sebanding tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di luar pendapatan nasional yang memiliki andil terhadap naik turunnya jumlah uang beredar di Indonesia. Faktor-faktor tersebut selain oleh keadaan perekonomian, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan lainnya juga dapat terjadi karena sumbangan-sumbangan sektor lainnya misalnya sektor migas dan nonmigas. Dalam upaya mengatasi hal tersebut diperlukan suatu kebijaksanaan dalam hal ini berupa kebijaksanaan moneter.

Kebijaksanaan moneter sebagai salah satu dari kebijaksanaan ekonomi makro pada dasarnya merupakan kebijaksanaan pengendalian jumlah uang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Dimana kebijaksanaan moneter adalah tindakan yang dibutuhkan oleh penguasa moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan kredit yang pada waktunya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, menurut UU. No. 23 Tahun 1999 kebijaksanaan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Pada periode tahun 1990 sampai tahun 2001, kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah meliputi paket-paket deregulasi yang antara lain :

- a. Paket 29 Januari 1990 (PAKJAN 1990)
- b. Paket Kebijakan Februari 1991 (PAKTRI 1991)
- c. Paket Kebijakan 29 Mei 1993 (PAKMEI 1993)

Untuk mendukung kebijaksanaan dan pencapaian sasaran di bidang moneter dilaksanakan program pembinaan lembaga keuangan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan peranan bank ataupun lembaga keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan pasar uang, agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Untuk mengurangi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam suatu negara dengan indikator ekonomi makro sebagai pengukurnya, pemerintah atau negara secara garis besar mempunyai dua macam pilihan kebijakan yang dapat digunakan. Kebijakan pertama adalah kebijakan pengurangan pengeluaran (*decreasing expenditure*) dan pengalihan pengeluaran (*switching expenditure*), termasuk di dalam kebijakan pengurangan pengeluaran adalah kebijakan moneter dan fiskal. Sedangkan sub kebijakan pengalihan pengeluaran antara lain kebijakan nilai tukar, kebijakan perdagangan, kebijakan perpajakan, dan lainnya.

Kebijakan pengurangan pengeluaran yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan dengan menggunakan instrument pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara umum. Kebijakan fiskal ini dijalankan oleh pemerintah (cq. Departemen Keuangan). Kedua adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan mempengaruhi kegiatan perekonomian dengan menggunakan jumlah uang beredar sebagai alat utamanya, kebijakan ini dijalankan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia).

Untuk kebijakan pengalihan pengeluaran baik di bidang perdagangan, perpajakan, harga, investasi dan kebijakan kelembagaan lainnya dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah.

Dalam melakukan kebijakan moneter digunakan 3 sasaran, yaitu sasaran akhir (*ultimate target*), sasaran antara (*intermediate target*) dan piranti (*instrument*). Sasaran akhir kebijakan moneter umumnya adalah indikator-indikator ekonomi makro yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas harga dan menjaga kestabilan neraca pembayaran. Sasaran antara kebijakan moneter adalah variabel-variabel yang ada di pasar uang yaitu tingkat suku bunga (*interest rate*) dan jumlah uang beredar (*monetary aggregate*).

Untuk dapat mengontrol baik suku bunga maupun jumlah uang beredar sebagai sasaran antara, Bank Indonesia melakukan kebijakan kontraksi/ekspansi dengan menggunakan piranti-piranti moneter yaitu cadangan wajib (*reserve requirement*), operasi pasar terbuka (*open market operation*), fasilitas diskonto (*discount rate policy*), dan himbauan (*moral suasion*).

- a. Cadangan Wajib adalah ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun.
- b. Operasi Pasar Terbuka adalah kegiatan jual-beli surat-surat berharga oleh Bank Indonesia. Dalam kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia melakukan jual-beli surat berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
- c. Fasilitas Diskonto adalah kebijaksanaan Bank Indonesia mempengaruhi JUB dengan penetapan diskonto pinjaman bank-bank. Dengan menetapkan tingkat diskonto yang tinggi diharapkan bank-bank akan mengurangi permintaan kredit dari Bank Indonesia yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah uang beredar dan sebaliknya.
- d. Moral Susion, kebijaksanaan Bank Indonesia memberi himbauan kepada bank-bank untuk tidak melakukan ataupun melakukan apa yang dihimbau oleh Bank Indonesia.

Analisis Inferensial (Statistik) Pengaruh Pendapatan Nasional Perkapita Terhadap Jumlah Uang Beredar (M1) di Indonesia.

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan nasional perkapita terhadap jumlah uang beredar (M1) di Indonesia secara kuantitatif.

Pada penelitian ini variabel yang dipilih adalah variabel pendapatan yaitu pendapatan nasional perkapita atas dasar harga konstan dan variabel jumlah uang beredar khususnya M1 yang mencakup uang kartal dan uang giral (C + DD).

Alat yang digunakan untuk menganalisis antara kedua variabel tersebut adalah pengujian dengan menggunakan model regresi linear sederhana (*simple linier regression*). Model persamaan yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = A + BX + ei$$

Dimana :

Y = Jumlah uang beredar (M1) di Indonesia

A = Nilai Konstanta

B = Koefisien pendapatan nasional perkapita terhadap jumlah uang beredar (M1) di Indonesia

X = Tingkat pendapatan

ei = Gangguan, menyatakan semua kekuatan yang mempengaruhi jumlah uang beredar namun belum diperhitungkan secara eksplisit

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = A + BX + ei$$

$$Y = -93311,226 + 0,06436X + ei$$

$$Se = (31868,682) \quad (0,22)$$

$$T\text{-hitung} = (-0,0292) \quad (2,911)$$

$$R = 0,677$$

$$R^2 = 0,459$$

$$T\text{-tabel} = 2,228$$

Untuk mengevaluasi hasil perhitungan regresi tersebut digunakan kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria Ekonomi

Yaitu Kriteria yang ditentukan oleh teori ekonomi. Jika nilai maupun tanda taksiran parameter tidak sesuai dengan kriteria apriori ekonomi, maka taksiran-taksiran tersebut hasilnya ditolak kecuali ada alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa dalam kasus ini prinsip-prinsip ekonomi tidak berlaku.

Dari persamaan hasil regresi linear sederhana di atas diperoleh bahwa koefisien variabel pendapatan terhadap jumlah uang beredar telah sesuai dengan teori. Dimana hubungannya bersifat positif dan bernilai sebesar 0,06436 untuk variabel pendapatan

nasional perkapita. Nilai dari koefisien ini menunjukkan bahwa jika nilai pendapatan nasional perkapita mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat sebesar 0,06436 rupiah dengan asumsi variabel lain ceteris paribus.

Tanda positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan nasional perkapita akan meningkatkan atau menurunkan jumlah uang beredar (M1) yang artinya pendapatan nasional perkapita dan jumlah uang beredar di Indonesia adalah searah (berbanding lurus) dimana bila pendapatan meningkat maka M1 pun meningkat, dan begitupun sebaliknya.

Sedangkan dari perhitungan regresi diperoleh nilai intersep atau konstanta sebesar -9311,226. Angka ini menunjukkan bahwa jika pendapatan nasional perkapita sama dengan nol atau sama sekali tidak ada pendapatan nasional perkapita, jumlah uang beredar akan tetap memiliki nilai dengan penurunan sebesar 9311,23 %.

Dari hasil penelitian tersebut dimana pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap jumlah uang beredar, menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan teori yang ada dan lolos dari uji kriteria ekonomi.

2. Kriteria Statistik (First Order Test)

Yaitu kriteria yang berdasarkan pada teori statistik. Dalam hal ini meliputi koefisien korelasi dan standar error dari taksiran dan kuadrat dari koefisien korelasi (koefisien determinan) yang dihitung dari data sampel.

Koefisien ini menjelaskan bahwa persentase dari variabel total disebabkan oleh perubahan variabel bebas. Kesalahan standar taksiran menggambarkan penyebaran (*dispersi*) di sekitar parameter yang sebenarnya. Oleh karena itu semakin besar kesalahan standar maka semakin kurang bisa dipercaya taksiran itu dan sebaliknya, semakin kecil kesalahan standar maka semakin bisa dipercaya taksiran itu.

Dalam hal kriteria statistik ini, penelitian hanya menggunakan koefisien determinan (R^2) dan standar error atau kesalahan.

Untuk menguji kebeartian atau kuat tidaknya hubungan antara variabel pendapatan nasional perkapita dan variabel jumlah uang beredar dapat dilihat dari koefisien determinan atau R-squared (R^2). Dimana koefisien determinan ini menunjukkan besarnya persentase dari jumlah variasi nilai Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X. Dimana variabel Y adalah jumlah uang beredar (M1) dan variabel X adalah pendapatan nasional perkapita.

Dari persamaan regresi linear sederhana di atas diperoleh koefisien determinan (R^2) sebesar 0,459. Hal ini berarti bahwa sebesar 45,9% perubahan pada JUB (M1) di Indonesia periode tahun 1990-2001 dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel pendapatan nasional perkapita dan sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang antara lain ; aktiva luar negeri bersih, tagihan bersih pada pemerintah pusat, tagihan pada lembaga dan perusahaan pemerintah, tagihan pada perusahaan swasta dan perorangan, serta faktor-faktor lainnya termasuk jaminan impor.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dapat dilihat dari koefisien korelasi ρ yang sebesar

0,677. Atau dapat dikatakan bahwa sebesar 67,7% pendapatan nasional perkapita sebagai variabel independen dan jumlah uang beredar sebagai variabel dependen memiliki hubungan yang erat sebesar 67,7%. Koefisien korelasinya yang sebesar 67,7% tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut sangat erat.

Standar error atau kesalahan standar dari persamaan regresi tersebut hanya sebesar 2,2% yang mana angka ini relatif kecil, karenanya taksiran ini dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan nasional perkapita dan jumlah uang beredar (M1) di Indonesia, secara statistik signifikan dan lolos uji statistik.

3. *Kriteria Ekonometrika (Second Order Test)*

Yaitu kriteria yang ditentukan oleh teori ekonometrika. Pengujian dengan kriteria ini membantu dalam menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan. Pengujian kriteria ini dilakukan dengan langkah yaitu pengujian dengan menggunakan uji hipotesis t (t-test).

Uji t ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, dengan menganggap variabel lainnya konstan. Atau dapat dikatakan untuk menguji ketepatan koefisien regresi digunakan pendekatan 2 arah dengan uji hipotesa t (t-test). Dimana secara umum uji 2 arah merupakan suatu prosedur untuk menguji benar tidaknya nilai parameter yang dinyatakan dalam hipotesis nol (H_0) dengan menggunakan suatu kriteria uji test yang dihitung berdasarkan data yang diteliti yaitu dari tahun 1990-2001.

Uji hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan nasional perkapita akan mempengaruhi jumlah uang beredar, dinyatakan sebagai berikut :

$H_0 = \beta = 0$ (tidak adanya hubungan antara variabel independent dan variabel dependen atau tidak ada hubungan antara pendapatan nasional perkapita dengan jumlah uang beredar (M1)).

$H_1 = \beta \neq 0$ (adanya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen atau terdapat hubungan antara pendapatan nasioanal perkapita dan jumlah uang beredar)

Pengujian 2 sisi dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan $\beta = 5\%$ dengan derajat kebebasan 10 yaitu $n-2$, serta tingkat signifikan sebesar 0,025 maka diperoleh t-tabel sebesar 2,228. Sedangkan dari perhitungan regresi linear sederhana diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,911.

Jadi dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,911 > 2,228$). Artinya hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen atau tidak adanya hubungan antara pendapatan dan jumlah uang beredar ditolak. Dan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan adanya hubungan antara variabel dependen (jumlah uang beredar) dari variabel independen (pendapatan) diterima. Ini berarti variabel pendapatan memiliki pengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.

Hal ini berarti bahwa variabel pendapatan dan jumlah uang beredar secara ekonometrika signifikan dan lolos uji ekonometrika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang sesuai dengan kriteria ekonomi diperoleh bahwa hubungan variabel pendapatan nasional perkapita dan jumlah uang beredar (M1) memiliki hubungan positif. Artinya hubungan kedua variabel tersebut searah atau berbanding lurus dimana bila pendapatan nasional perkapita meningkat maka jumlah uang beredarpun mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.

Dari hasil pengujian yang sesuai dengan kriteria statistik, dapat dilihat bahwa variabel pendapatan mampu menjelaskan variabel jumlah uang beredar sebesar 0,459. Atau dapat dikatakan bahwa 45,9% jumlah uang beredar (M1) di Indonesia dijelaskan oleh pendapatan nasional perkapita. Sedangkan sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain pendapatan nasional perkapita.

Hubungan antara variabel pendapatan dan jumlah uang beredar di Indonesia memiliki hubungan yang signifikan yang ditunjukkan oleh t-test dimana nilai t hitung (2,911) yang lebih besar dari t tabel (2,228). Atau dengan kata lain t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,922 > 2,228$).

Dari hasil regresi linear sederhana yang dilakukan di dapat bahwa kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sebesar 0,677. Atau dapat dikatakan bahwa antara pendapatan dan jumlah uang beredar memiliki kekuatan sebesar 67,7%.

Saran-saran

Dalam upaya pengendalian jumlah uang beredar diperlukan suatu kebijaksanaan yaitu kebijaksanaan moneter melalui pihak perbankan dengan menggunakan instrumennya. Sebaiknya dalam menggunakan instrumen tersebut memang telah sesuai dengan sasaran yang ditargetkan dan hendaknya pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan moneternya harus diiringi dengan pengawasan yang cermat sehingga kebijaksanaan tersebut tidak menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi.

Perlu semakin disempurnakan peraturan pengawasan pembinaan perbankan, termasuk peraturan mengenai prudential banking akan semakin memperbaiki kualitas lembaga perbankan sehingga akan menimbulkan persaingan yang sehat antara lembaga perbankan di Indonesia. Sehingga lembaga perbankan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan efek-efek yang buruk yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara.

Kecilnya pengaruh yang terjadi dari kedua variabel yang diteliti dikarenakan variabel lain dianggap ceteris paribus yang tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Sehingga untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya menambahkan variabel lainnya sehingga diperoleh pengaruh yang cukup besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1991/1992*
Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1994/1995*
Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 2001*
Bank Indonesia, *Satistik Ekonomi Keuangan Indonesia 1996*.
Bank Indonesia, *Satistik Ekonomi Keuangan Indonesia 2001*.
Biro Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia, 1995*.
Biro Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia, 1998*.
Biro Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia 1998-2002*
Biro Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia 1993-1995*
Biro Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia 1987-1992*
Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 1995*.
Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2001*.
Boediono, *Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta, 1994
Boediono, *Ekonomi Moneter*. BPFE. Yogyakarta, 1996.
Dajan, Anto, *Pengantar Metode Statistik*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996.
Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992
Hansen, Alvin. H, *Teori Moneter dan Kebijakan Fiskal*, Bhatara, Jakarta, 1996.
Hoevitz, Paul. M, dan Richard A. Ward, *Monetary Policy and The Financial System*,
New Jersey, 1987.
Indrawati, Sri Mulyani, *Teori Moneter*, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
Jhingan, M. L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
1998.
Kerangka Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Disampaikan pada pertemuan Bank
Indonesia Palembang dengan Akademisi dan Wrtawan Palembang, 7 Juni 2001.
Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987.
Machmud, Syamsuddin, *Ekonomi Moneter Indonesia*, Penerbit Yayasan Kesejahteraan
Ummat, Jakarta, 1985.
Meyers, Albert L, *Unsur-Unsur Ekonomi Modern*, Bhatara, Jakarta, 1965
Reksoprayitno, Soediyono, *Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta, 2000.
Sutojo, Siswanto, *Analisa Kredit Bank Umum : Konsep dan Tehnik*, PT. Pustaka Binaman
Pressindo, Jakarta, 1995.
Sugiantoro, Catur, *Ekonometrika Terapan*, BPFE, Yogyakarta, 1994.
Supranto, J, *Ekonometrik*, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
Wijaya, Faried, *Ekonometrika Makro-Moneter dan Perbankan*, BPFE, Yogyakarta, 1992
Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi Teoritika Modern*, Penerbit Tarsiti, Bandung, 1985.
-----, *Ekonomi Modern*, Badan Penerbit Soecyta, Bandung, 1968.
-----, *Pengantar Ekonomi Moneter*, Penerbit Tarsiti, Bandung, 1987.